



Sejumlah APK milik salah satu paslon peserta Pilkada Kota Jogja dipasang di pohon di kawasan Timoho, Rabu (6/11).

► PILKADA KOTA JOGJA

Bawaslu Dalam Dugaan Politik Uang

KOTAGEDE—Di masa kampanye Pilkada 2024, Bawaslu Kota Jogja mendapati satu laporan dugaan politik uang yang dilakukan oleh salah satu paslon.

Alli Ambasa Karis & Luger Subertha
redaksi@harianjogja.com

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Jogja, Jantan Putra Bangsa, menuturkan laporan diterima dari seorang warga Wunguharjo, Umbulharjo, pada Rabu (6/11). Laporan yang diterima yakni praktik politik uang berupa pembagian sembako. Jantan menuturkan jajarannya segera menindaklanjuti laporan tersebut sesuai regulasi. "Untuk tahap awal akan dilakukan kajian untuk meneliti kelengkapan berkas dan syarat formulir laporan dugaan pelanggaran," ujar Jantan saat dikonfirmasi, Rabu. Setelah laporan dinyatakan memenuhi syarat kajian, selanjutnya dilakukan registrasi laporan dan penanganan laporan. Bawaslu Kota Jogja akan menanggapi pilak pelapor, terlapor, dan saksi. Sejak kampanye bergulir pada 25 September 2024, Bawaslu baru menerima satu laporan pelanggaran

- Laporan yang diterima yakni praktik politik uang berupa pembagian sembako.
- Sesuai peraturan yang berlaku, pasangan calon tidak boleh membagikan uang atau materi lainnya selain bahan kampanye.

kampanye, termasuk dugaan politik uang. Jantan mengatakan sesuai peraturan yang berlaku, pasangan calon tidak boleh membagikan uang atau materi lainnya selain bahan kampanye. Sementara, dari laporan yang diterima, praktik politik uang dilakukan dengan pembagian sembako sehingga ini menjadi dugaan pelanggaran kampanye.

Kembali Bermunculan
Sementara, meski penertiban alat peraga kampanye (APK) baru saja dilakukan, pekan ini, APK yang melanggar ketentuan pemasangan, khususnya yang dipasang di pohon kembali bermunculan. Berdasarkan pantauan *Harian Jogja*, sejumlah APK milik tiga paslon peserta Pilkada Kota Jogja banyak dipasang di pohon. Di sekitar XT Square, Umbulharjo, terlihat beberapa APK milik paslon nomor urut 1, 2 dan 3 banyak dipasang di pohon. APK berupa banner banyak dipasang dengan cara dipaku dan diikat menggunakan

katup di pohon. Jantan Putra Bangsa mengatakan APK yang dipasang di pohon tersebut semuanya baru terpasang pasca penertiban. Sebagai tindak lanjut, Bawaslu Kota Jogja akan kembali membuat rekomendasi pelanggaran administrasi dan penertiban. "Ada penertiban lagi. Akan ada rekomendasi pelanggaran administrasi ke depan," katanya. Kabid Pergerakan Peraturan Perundang-Undangan Saipol, PP Kota Jogja, Dodi Kurnianto, menuturkan jajarannya menunggu rekomendasi dari Bawaslu untuk menertibkan APK. "Kami menunggu rekomendasi dari Bawaslu dan KPU. Kami siap memfasilitasi penertiban," kata dia.

Sebelumnya, sebanyak 525 APK melanggar aturan disopot dan diangkut oleh petugas pada Rabu (23/10). Ratusan APK tersebut melanggar Perwal No. 65/2024 yang memuat aturan terkait pemasangan APK. Pelanggaran paling banyak yakni pemasangan APK di pohon, tiang listrik dan fasilitas umum.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005